

ISLAM TRANSNASIONAL: TANTANGAN BAGI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Muhammad Nasir¹

Abdullah Khusairi²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

muhammadnasir@uinib.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8847>

Received 17 January 2024	Revision 23 April 2024	Recived 01 May 2024	Publised 12 May 2024
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract: *This article discusses the impact and challenges of Transnational Islamic groups on strengthening Religious Moderation in Indonesia in promoting a balanced, tolerant and peaceful understanding of Islam, both at the local and global levels. This article was written using the exposition report method which relies on the strength of the author's opinion in reviewing literature facts about Transnational Islam and Religious Moderation in Indonesia. The concepts of Transnational Islam and Religious Moderation in this article are positioned in a face-to-face relationship, where Transnational Islam is positioned as a challenge for strengthening Religious Moderation in Indonesia. This article concludes that Transnational Islamic Groups, which in terms of ideology and religious practices contain a spirit of religious exclusivism, exclusivism, and violent extremism, are a challenge to religious moderation in Indonesia. These three spirits were formulated by the religious moderation program with the abbreviation REEVE. Based on these three challenge formulations, it can be understood that Strengthening Religious Moderation as a public policy is the Indonesian government's response to exclusive, extreme and radical religious practices which have a negative impact on the harmonization of social life in society and at the same time endanger the integrity of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *transnational Islam, exclusivism, religious moderation, religious exclusivism, violent extremism*

Copyright © 2024, Muhammad Nasir, Khusairi
This work is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Artikel ini akan menjelajahi dampak dan tantangan kelompok Islam Transnasional (selanjutnya disingkat ITn) terhadap Penguatan Moderasi Beragama (PMB) di Indonesia dalam mempromosikan pemahaman Islam yang seimbang, toleran, dan damai, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Aktivitas gerakan Islam transnasional dianggap sebagai tantangan bagi program Penguatan Moderasi Beragama (selanjutnya disingkat PMB). Tantangan ini cenderung dinarasikan dalam isu-isu seperti radikalisasi, konflik antaragama, dan pergeseran politik.¹ Selain itu, di Indonesia ada kecenderungan gerakan tersebut mendekat dan mencoba mencari

¹ Anthony Reid, "Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia," in *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, ed. Bernard Adeney-Risakotta (Bandung: Mizan, 2015).

konteks lokal gerakannya,² sekaligus mempertanyakan keberagaman itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan imaji “satu Islam” yang di antaranya digemakan oleh beberapa kelompok gerakan ITn yang ada di Indonesia.

Sementara, Indonesia adalah negara yang unik dalam hal beragama dan budaya, yang nyaris tiadaandingannya di dunia.³ Dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai 237,56 juta dan terbesar pula di dalam negeri Indonesia dengan persentase mencapai angka 86,7 persen dari total penduduk Indonesia,⁴ Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Negara ini memiliki beragam tradisi keagamaan dan kultural yang berasal dari berbagai suku dan daerah, menciptakan keragaman dalam praktik keagamaan dan pemahaman Islam.⁵ Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Di balik kenyataan itu, juga muncul kesadaran memelihara keberagaman agar tidak memberi mudarat bagi kesatuan Indonesia.

Di Indonesia, pengaruh gerakan dan ideologi Islam transnasional terlihat cukup signifikan.⁶ Beberapa kelompok yang memiliki hubungan ideologi dan jaringan organisasi internasional, telah beroperasi di Indonesia. Perkembangan ini telah menimbulkan isu yang beragama, baik dari segi ajaran, praktik keagamaan, kecenderungan politik hingga isu keamanan.

Pada dasarnya karakter Islam di Indonesia bercirikan transnasionalisme dari segi mazhab, aliran dan praktik ritual masyarakatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya mazhab dan aliran yang bercirikan Sunni di Indonesia di samping adanya aliran bermazhab Syi’ah dan lain-lain.⁷ Namun perkembangan kajian terakhir, transnasionalisme Islam di Indonesia cenderung ditulis di dalam narasi transnasionalisme yang bernuansa politik aliran dan politik kekuasaan. Misalnya, transnasionalisme Islam dikembangkan dalam kawasan kajian penyebaran

² Nurhadi Suchahyo, ‘Ideologi Islam Transnasional Dan Transformasi Ke Konteks Lokal’, voaindonesia.com, 2020.

³ Lukman Halim Saefuddin, ‘Sketsa Kehidupan Beragama Di Indonesia’ (Padang: Balai Diklat Keagamaan Padang, 2022).

⁴ Monavia Ayu Rizaty, ‘Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022’, 2022.

⁵ Martin Van Bruinessen, ‘Indonesian Muslims and Their Place in the Larger World of Islam’, *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant*, no. January 2011 (2012): 117–40, <https://doi.org/10.1355/9789814380416-013>.

⁶ Suchahyo, ‘Ideologi Islam Transnasional Dan Transformasi Ke Konteks Lokal’.

⁷ Chiara Formichi, ‘From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia’s Shi’i Communities’, *Al-Jami’ah* 52, no. 1 (2014): 101–26, <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.101-126>.

organisasi, jaringan dan aliran keagamaan yang terasosiasi dengan istilah salafisme, wahabisme, radikalisme, terorisme dan revivalisme Islam.⁸

Dalam konteks kajian politik aliran dan politik kekuasaan (kebangsaan), wacana Islam Transnasional di Indonesia sering dihadap-hadapkan (*confronted as an opponent*) dengan wacana Islam kultural yang khas Indonesia, dan wacana politik kebangsaan Indonesia yang di tingkat Indonesia dimaksudkan untuk mengusung Islam yang khas Indonesia. Sementara di tingkat global dimaksudkan sebagai strategi untuk mengenalkan Islam politik Indonesia sebagai salah satu model politik Islam yang berorientasi pada kedamaian dan toleransi di masyarakat dunia yang plural. Di tingkat Indonesia, narasi oponental atau saling berhadap-hadapan (*narration of opponentality*) ini terkadang menimbulkan konflik horizontal di antara kelompok pengikut aliran Islam kultural dengan kelompok pengikut aliran transnasional. Situasi ini sepertinya menjadi latar sosial program moderasi beragama oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong toleransi dan kerukunan antaragama. Dalam konteks politik keamanan Indonesia, disebut dengan upaya membangun stabilitas politik nasional di tingkat umat beragama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan nasional.

Oleh sebab itu, tulisan ini akan melakukan penelusuran yang bersifat ekspositif terkait hal-hal yang dianggap tantangan yang bersumber dari aktivitas gerakan ITn terhadap Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia.

METODE

Pembahasan tulisan ini menggunakan metode laporan eksposisi (*exposition report*) dan menggunakan teori transnasionalisme dan pendekatan kebijakan publik sebagai alat mengumpulkan bahan kajian, menguji dan menyusul kesimpulan eksposisi yang sifatnya menjelaskan temuan. Teori transnasionalisme menjadi teori kunci untuk membahas dampak gerakan Islam transnasional di Indonesia dan digunakan untuk menggali bagaimana ideologi, pengaruh, dan organisasi lintas batas negara ini memengaruhi praktik keagamaan dan sosial di Indonesia. Sementara, pendekatan kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia merespons tantangan dari Islam transnasional terhadap moderasi beragama melalui kebijakan publik dan langkah-langkah hukum.

PEMBAHASAN

Tentang Islam Transnasional

Konseptualisasi Islam Transnasional dalam tulisan ini akan merujuk kepada banyak pendapat yang digunakan oleh para ahli yang membahas tentang Islam

⁸ Delphine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy Transcending the State* (New York: Routledge, 2016).

Transnasional. Hal ini disebabkan kompleksitas kajian Islam Transnational meliputi kajian konseptual, aliran, kelompok atau organisasi, aliran utama dan sempalan serta kecendrungan aksinya di berbagai negara, terutama di Indonesia. Beberapa pakar yang pendapatnya akan dikutip di antaranya Olivier Roy, Peter Mandaville, Karen Armstrong, Sidney Jones dan John L Esposito. Para sarjana ini akan dikutip dan di analisis pendapatnya tentang Islam Transnasional dan perkembangan global. Dalam pembahasan, berkemungkinan juga akan muncul pendapat-pendapat lainnya yang relevan untuk memahami konsepsi tentang Islam Transnasional ini.

Olivier Roy yang banyak menulis tentang Islam transnasional, terorisme global, dan radikalisme, memberikan wawasan tentang hubungan antara Islam transnasional dan perkembangan global. Ia memberikan sebuah alternatif jawaban bahwa gerakan yang bercirikan salafisme, jihadisme dan terorisme di beberapa negara merupakan bentuk adaptasi atas tekanan dan peristiwa yang mereka hadapi di dunia nyata. Bentuknya akan berbeda di setiap wilayah.⁹ Menurut Roy, kebangkitan Islam dibarengi dengan tumbuhnya westernisasi. Kebangkitan gerakan Islam lintas bangsa ini menurutnya merupakan konsekuensi dari westernisasi, bukan pertentangan dengan westernisasi. Gerakan yang bercirikan salafisme, jihadisme dan terorisme yang muncul di beberapa negara masa depan, merupakan bentuk keprihatinan akan meluasnya pengaruh budaya, dan norma sosialnya terhadap Islam sebagai sistem nilai dan etika.¹⁰ Sementara dalam konteks lokal di beberapa negara ia memberikan argumen bahwa kemunculan gerakan politik Islam di berbagai negara disebabkan politisasi Islam di negara tersebut seringkali tidak membuahkan hasil yang diharapkan.¹¹

Sementara John L Esposito memandang bahwa Islam transnasional sebagai sebuah fenomena Islam politik yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan politik oposisi mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Sebagai oposisi, gerakan ini berupaya menggoyahkan rezim yang sedang berkuasa. Fenomena Islam politik ini berakar pada kebangkitan agama kontemporer dalam kehidupan para pengikutnya, baik sebagai pribadi,¹² atau sebagai bagian dari publik. Menurutnya banyak umat Islam menjadi lebih serius menjalankan ibadah mereka (sholat, puasa, pakaian, dan sebagainya). Selain kesolehan individu itu mereka juga berkeinginan menjadikan Islam muncul kembali sebagai alternatif atas kegagalan ideologi sekuler

⁹ Théo Blanc and Olivier Roy, "Salafism: Challenged by Radicalization?," 2021, <https://doi.org/10.2870/309942>.

¹⁰ Olivier Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah* (New York: Columbia University Press, 2004).

¹¹ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1994).

¹² Zafar Ishaq Ansari & John L Esposito, *Muslims and the West - Encounter and Dialogue* (Georgetown University, 2001).

seperti nasionalisme, kapitalisme, dan sosialisme.¹³ Simbol, retorika, aktor, dan organisasi Islam selanjutnya menjadi sumber legitimasi dan mobilisasi, yang menjadi masukan bagi aktivisme politik dan sosial.

Peneliti lainnya, Peter Mandaville banyak juga membahas peran kelompok-kelompok Islam transnasional dan dampaknya dalam politik global. Ia menjelaskan bahwa Islam politik sebagai fungsi posisionalitas Islam dalam hubungan negara-masyarakat dan juga berfungsi sebagai gambaran deskriptif luas atas fenomena tersebut dalam konteks komparatif.¹⁴ Pembahasan Mandaville cukup membantu untuk memahami fenomena Islam transnasional dalam konteks hubungan kelompok jaringan Islam transnasional di sebuah negara dengan negara tempat mereka beraktivitas.

Berikutnya, adalah Karen Armstrong seorang penulis dan sejarawan agama yang telah menulis banyak buku tentang Islam. Karyanya dapat membantu memahami konteks historis dan budaya dari Islam transnasional. Karyanya berjudul *Fields of Blood: Religion and the History of Violence*¹⁵ adalah sintesis dari keilmuannya tentang kekerasan agama dan non-agama dari zaman dahulu sampai sekarang. Buku ini menempatkan persoalan kekerasan agama dalam konteks yang lebih luas dengan mempertimbangkan akar sosio-ekonomi, politik dan budayanya. Karyanya itu merupakan kontribusi berharga untuk memahami perdebatan tentang ekstremisme agama, radikalisme, fanatisme, dan apa yang disebut sebagai terorisme agama yang banyak terjadi di dunia akhir-akhir ini.¹⁶

Kemudian, perlu juga membaca karya-karya Sidney Jones untuk mencari pemahaman tentang isu-isu terorisme, radikalisme, dan peran Islam transnasional di Asia Tenggara. Dalam kasus Indonesia, Islam transnasional dapat dibaca dalam artikelnya berjudul *Terrorism in Indonesia: A Fading Threat?*¹⁷ dapat diperoleh informasi tentang upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi radikalisasi dan terorisme, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Sidney Jones memahami bagaimana gerakan Islam transnasional memengaruhi dinamika ini. Islam transnasional dalam tulisannya lebih mengarah kepada jaringan terorisme. Ia menilai, meskipun kapasitas calon teroris pada umumnya rendah, tetapi ada tiga faktor yang dapat menyebabkan antusiasme baru untuk berjihad di dalam negeri, yaitu

¹³ John L. Esposito, 'Political Islam and the West' (Washington DC, 2000).

¹⁴ Peter Mandaville, *Islam and Politics, Islam and Politics*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9781315814773>.

¹⁵ Karen Armstrong, *Fields of Blood: Religion and the History of Violence* (New York: Knopf, 2004).

¹⁶ Senad Mrahorović, 'Karen Armstrong, Fields of Blood: Religion and the History of Violence', *Religions: A Scholarly Journal*, 2016, <https://doi.org/10.5339/rels.2016.peace.21>.

¹⁷ Sidney Jones Solahudin, 'Terrorism in Indonesia: Fading Threat?', *Southeast Asian Affairs*, 2014, 139-147.

kemarahan atas kematian tersangka dalam operasi polisi; pembebasan dari penjara bagi terpidana ekstremis; dan kembalinya pejuang Indonesia dari Suriah.

Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada beberapa konsep yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan pemahaman tentang Islam Transnasional di Indonesia. *Pertama*, dari segi geografis, Islam Transnasional merupakan gerakan yang bersifat global dan melintas batas negara dan bermuatan politik. *Kedua*, dari segi ideologi cenderung mengambil bentuk gerakan salafisme, jihadisme dan terorisme. *Ketiga*, dari segi wacana lebih cenderung ke arah isu politik global seperti westernisasi, kapitalisme global dan sosialisme. *Keempat*, dari segi aktor cenderung bersumber dari kelompok gerakan Islam yang mengambil peran sebagai oposisi terhadap negara. Berdasarkan empat konsep di atas, pengenalan dan pemahaman terhadap Islam Transnasional di Indonesia akan dirumuskan dalam tulisan ini.

Islam Transnasional di Indonesia

Gerakan Islam transnasional adalah sebuah terminologi yang tergolong baru dalam kajian akademik. Istilah tersebut telah menjadi sebuah 'nomenklatur' yang secara umum dipahami sebagai sebuah ideologi yang melintasi batas kenegaraan (*nation state*). Kehadiran gerakan Islam Transnasional di Indonesia merupakan bagian dari revivalisme gerakan Islam di Timur Tengah dan berpengaruh langsung terhadap pola Islam di Indonesia.¹⁸ Menurut J. Bowen gerakan ini mencakup tiga hal yaitu pergerakan demografis, lembaga keagamaan transnasional, dan (3) perpindahan gagasan atau ide.¹⁹

Nomenklatur ini dapat diselaraskan dengan konsep Islam Transnasional yang dibahas terdahulu, gerakan Islam Transnasional di Indonesia dapat didefinisikan sebagai gerakan Islam politik yang bersifat global dan melintasi batas negara, dari segi ideologi cenderung mengambil bentuk gerakan salafisme, jihadisme dan terorisme,²⁰ dari segi wacana lebih cenderung ke arah isu politik global seperti westernisasi, kapitalisme global dan sosialisme serta dari segi aktor cenderung bersumber dari kelompok gerakan Islam yang mengambil peran sebagai oposisi terhadap negara. Definisi ini akan menjadi panduan untuk melakukan identifikasi terhadap gerakan Islam transnasional dari aspek aktor, ideologi, dan isu-isu yang diusung, sejak pra kemerdekaan hingga waktu terkini.

ITn dari masa Pra-kemerdekaan hingga Reformasi

¹⁸ Aksa Aksa, 'Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia', *Yupa: Historical Studies Journal* 1, no. 1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.30872/yupa.v1i1.86>.

¹⁹ Masdar Hilmy, 'Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.

²⁰ Abdullah Khusairi, *Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer: Kontestasi Diskursus Radikalisme Di Media Massa, Dialog*, vol. 44 (Semarang: RaSail Media Group, 2019).

Ada banyak studi yang membahas tentang akar sejarah gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Artikel Khamdan, *-sebagai contoh studi-* mengamini bahwa gerakan ITn berakar pada gerakan Padri di Minangkabau, Sumatera Barat pada awal abad ke-19.²¹ Gerakan Padri ini menurut Khamdan kemudian direproduksi sebagai model perlawanan di berbagai daerah, seperti Perang Lampung (1832-1833), Perang Banjar (1859-1905), Perang Batak (1872-1907), Perang Aceh (1873-1914) dan Perang Jawa di berbagai tempat.

Meskipun demikian, Abd A'la dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya (2008) menyatakan, gerakan Islam semisal gerakan Padri tersebut tidak bisa disimplifikasi hanya tersebut kepada akar yang sama atau hanya bersifat ideologi-teologis semata.²² Namun menurut A'la, secara arkeologis, pemikiran kelompok ini Padri dilabuhkan dalam tindakan memiliki normativitas dan impiannya sendiri. Bahkan di sana bisa jadi ada diskontinuitas antara dua kelompok tersebut. Pendapat A'la ini sejalan dengan konsepsi Esposito tentang ITn sebagai sebuah fenomena Islam politik yang mengambil peran oposisi dan berupaya menggoyahkan rezim yang sedang berkuasa.²³ Dalam konteks ini, Kaum Padri merupakan oposan dan Kaum Adat sebagai rezim yang sedang berkuasa. Penulis cenderung melacak akar ITn di Indonesia ke akhir abad ke-19 melalui gagasan Pan Islamisme. Gagasan Pan-Islamisme muncul di tengah kondisi umat Islam yang tidak menentu; terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme barat, stagnasi dalam kehidupan beragama, dan juga perpecahan yang terjadi di dalam umat Islam itu sendiri. Keabsahan Pan Islamisme sebagai akar gerakan ITn di Indonesia ditandai dengan terhubungnya beberapa gerakan Islamisme di Indonesia dengan ideolog, gerakan dan aktornya di berbagai belahan dunia. Menurut Anthony Reid sebuah gerakan dianggap Pan-Islamisme jika ia memberikan suatu basis ideologis untuk kerja sama di antara, atau di luar, satuan-satuan politik tersendiri; di dalam suatu perjuangan politik yang ada di bawah bendera Islam.²⁴

Chiara Formichi memberikan kesan bahwa geliat ITn di Indonesia bermula dari 1) peristiwa penghapusan kekhalifahan oleh pendiri republik sekuler Turki (1923) yang memicu perdebatan di hampir seluruh negeri berpenduduk muslim. Di Indonesia, peristiwa ini direspon dengan pembentukan Komite Hijaz pada tanggal 31 Januari 1926. 2) dengan penaklukan Saudi atas Mekah di Semenanjung Arab tahun

²¹ Muh Khamdan, 'Penanganan Potensi Radikalisme', *Journal.Stainkudus.Ac.Id* 10, no. 1 (2016): 207-32.

²² Abd A'la, 'Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar Dan Karakteristik Pemikiran Dan Gerakan Kaum Padri Dalam Perspektif Hubungan Agama Dan Politik Kekuasaan', Unpublish Paper IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

²³ Esposito, 'Political Islam and the West'.

²⁴ Anthony Reid, 'Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia', *The Journal of Asian Studies* 26, no. 2 (1967): 267-83, <https://doi.org/10.2307/2051930>.

1924,^{25,26} dan 3) persoalan Palestina yang sudah memanas. Ketiga isu itu menurut Formichi, mendominasi perdebatan politik di Indonesia seperti di negara-negara Muslim lainnya. Hal ini menjadi elemen yang kuat untuk menggalang simpati umat Islam dan menyalurkannya ke dalam perjuangan anti-kolonial, namun tujuan kelompok agama tersebut adalah untuk secara bertahap beralih dari pembentukan kekhalifahan transnasional dan menuju pembentukan negara-bangsa yang merdeka. Formichi menulis bahwa istilah pan-Islamisme merupakan sequel lanjutan dari beberapa peristiwa di atas. Istilah ini pertama kali muncul pada akhir September 1928 melalui mulut Kartosuwiryo. Meskipun Kartosuwiryo sebagai aktivis Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menyatakan dukungan terhadap gagasan Pan Islamisme,^{27,28} tetapi itu bukan tujuan utamanya. Ia tidak bermaksud mendukung berdirinya komunitas Muslim global, tetapi sasaran akhirnya tetaplah kemerdekaan dalam identitas nasional Indonesia.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, ada beberapa elemen gerakan Islam yang terlihat memiliki irisan ideologis dengan Pan Islamisme. Tetapi, di level nasional, keterhubungan ideologi ITn tidak begitu mengesankan. Misalnya Sarekat Islam, H.O.S. Tjokroaminoto dalam bukunya Islam dan sosialisme melihat gagasan Pan Islamisme sebagai sebuah peluang untuk membangun jaringan internasional untuk mencapai tujuan sosial-politiknya, sekaligus sebagai *pernyataan sikap* umat Islam merespon ketimpangan sosial di berbagai negara.²⁹ Tetapi, di tingkat Indonesia, gagasan Pan-Islamisme merupakan sebuah kontestasi politik untuk merespon gagasan Pan Asiatic Sukarno serta ideologi sekulernya.

Fakta ini menunjukkan bahwa Pan-Islamisme dalam konteks pembahasan ITn di Indonesia dapat dipahami sebagai 1) sebuah pendekatan ideologis untuk merespon westernisasi pada masa itu yang berwujud kolonialisme dan imperialisme negara-negara barat terhadap dunia timur, termasuk Indonesia. 2) Meskipun demikian, implementasi gagasan Pan Islamisme dalam konteks ITn di Indonesia tetaplah unik dan terpisah, karena aspek globalisasi gerakannya hanya terbatas pada level wacana (spirit dan ideologi), tetapi dari segi tujuan, menyesuaikan dengan kebutuhan muslim Indonesia di masa itu, yaitu merespon mismanajemen³⁰ atau Kartosuwiryo

²⁵ Formichi, 'From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities'.

²⁶ Shawkat M. Toorawa Eric Tagliacozzo, *The Hajj: Pilgrimage in Islam*, ed. Shawkat M. Toorawa Eric Tagliacozzo, *Choice Reviews Online*, vol. 53 (New York: Cambridge University Press, 2016), <https://doi.org/10.5860/choice.197177>.

²⁷ Chiara Formichi, 'Pan-Islam and Religious Nationalism : The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia', *Indonesia* 90, no. October (2010): 125-46.

²⁸ Kartosuwiryo, 'Aniajaan Dan Siksaan', September 1926.

²⁹ Jusuf Wibisono, *Islam Dan Sosialisme* (Djakarta: Pustaka Islam, n.d.).

³⁰ Formichi, 'From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities'.

menggunakan istilah *Aniajaan dan Siksaan*³¹ dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Model ITn ala Kartosuwirjo dan Tjokroaminoto ini akan berlanjut pada gerakan Islam Transnational Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, termasuk di zaman Orde Baru dan Reformasi.

Di masa Orde Baru (1966-1998), gerakan ITn tidak mendapat tempat. Hal ini disebabkan kontrol ketat dari rezim Suharto, Presiden RI selama orde Baru. Suharto memiliki sistem yang ketat, yang tidak memungkinkan tampilnya ideologi Islamis di hadapan publik secara bebas. Penerapan “Asas Tunggal Pancasila” adalah contoh di mana kebebasan benar-benar menjadi milik penguasa saat itu.³² Meskipun demikian, kontribusi sarjana revivalis alumnus Timur Tengah, khususnya yang pernah menempuh pendidikan di Mesir, Yaman, Sudan dan Saudi Arabia dan politisi Muhammad Natsir, melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), ia merupakan kunci penentu peredaran ideologi ITn di kalangan umat Islam Indonesia di masa Orde Baru,³³ sekaligus menjadi generasi yang akan menentukan ideologi, karakter dan bentuk gerakan ITn di Indonesia di masa reformasi (setelah 1998).

Di masa reformasi, ITn yang sebelumnya tidak pernah tampil di saat Orde Baru, telah mendapatkan tempatnya. Ikhwanul Muslimin atau Gerakan Tarbiyah bertransformasi menjadi Partai Keadilan (Sejahtera), Wahabisme tidak lagi direpresentasikan oleh Muhammadiyah atau Persis, tetapi juga Salafiyyah, lalu hadir juga Hizbut Tahrir Indonesia.³⁴ Noorhaidi Hasan menyebutkan beberapa nama nama-nama kelompok ITn radikal seperti Laskar Jihad (LJ) dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah (FKAWJ), Laskar Mujahidin Indonesia (LMI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Islamiyah (JI). Di awal tahun 2000-an, jejak ITn jalur jihadi terlihat dari aktor yang terlibat konflik sosial keagamaan di Ambon dan Poso. Beberapa aktor tersebut merupakan jebolan negara-negara Timur Tengah dan pernah ikut berjihad di Afghanistan.³⁵

Meskipun di Indonesia juga berkembang beberapa gerakan Islam yang cenderung beraliran keras (*hard line*), tetapi beberapa ahli cenderung menggolongkannya kepada gerakan fundamentalisme Islam.³⁶ Dapat dicatat organ gerakan seperti Lasykar Jihad, Front Pembela Islam (FPI) dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) yang cenderung mengambil pola gerakan bergaya militer (Turmudi, 2005). Sebagai contoh, Front Pembela Islam (FPI) memang ‘agak sulit’ dikategorikan

³¹ Kartosuwirjo, ‘Aniajaan Dan Siksaan’.

³² Douglas Edward Ramage, ‘Ideological Discourse in the Indonesian New Order : State Ideology and the Beliefs of an Elite, 1985-1993’ (University of South Carolina, 1993).

³³ Muhammad Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: Erlangga, 2005).

³⁴ Syamsul Arifin & Hasnan Bachtiar, ‘Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam’, *Jurnal Harmoni* 19, no. 3 (2013): 19-36, <https://doi.org/10.24252/vp.v1i1.8099>.

³⁵ Muhammad Nasir, ‘The Historical Background of The Ideology of Terrorism In Indonesia After’, *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2016): 46.

³⁶ Nasir.

dalam kategori transnasional, karena berakar pada tradisi keagamaan Islam tradisional seperti Nahdatul 'Ulama.³⁷ Belakangan, gerakan Islam *hard liners* ini juga menyusup dan "menginvasi" ke organisasi-organisasi Islam yang lebih dulu hadir, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), al-Irsyad, Jami'atul Khoir, dan lain-lain.³⁸

Salah satu "wajah lain" dari ekspresi ITn di Indonesia yang dikaitkan dengan peristiwa politik elektoral (pemilu) di Indonesia, adalah munculnya istilah politik identitas. Misalnya karya tim penulis Setara Institut tentang politik identitas Islam pasca Orde Baru itu dapat dipahami sebagai perkembangan wacana dan ekspresi aktor ITn di Indonesia. Politik Identitas pasca Orde Baru itu dapat dibaca dalam tiga fase utama, yaitu "konflik antaragama" di Maluku dan Poso, proyek Islamisasi ruang publik kebangsaan, dan penyerangan terhadap aliran sesat dan anti kristenisasi.³⁹

Ideologi dan Agenda ITn di Indonesia

Ideologi bersifat simbolis, afektif, perilaku, dan relasional. Pemberlakuan ideologi pada dasarnya bersifat dramaturgi dan interaksional.⁴⁰ Oleh sebab itu, ideologi didasarkan pada serangkaian metafora dan gambaran yang relatif sederhana yang ditanggapi orang berdasarkan pengalaman dan harapan bersama. Ideologi tidak murni bersifat kognitif, namun secara prinsip bergantung pada respons emosional. Berdasarkan definisi ini, spirit ideologisasi ITn dapat dikenali melalui istilah salafisme-wahabisme, radikalisme, terorisme dan revivalisme Islam yang digunakan oleh berbagai literatur.

Ideologi Salafisme-wahabisme merupakan suatu gerakan pemikiran-agama yang lahir dari aliran Islam Sunni dan aliran Hanbali.⁴¹ Disebut dengan salafisme-wahabisme karena adanya kesamaan isu, metode dan agenda gerakan dakwahnya. Meski tidak semua kelompok salafisme menegaskan hubungannya dengan aliran Sunni-Hanbali namun ada kesamaan karakter di antara kelompok ini, yang utama adalah penafsiran radikal dan *retrograde* terhadap sumber-sumber Islam. Karakteristik penafsiran ini dapat ditelusuri dan bertemu ke sosok dan pemikiran Taqi Ad-Din Ahmad Ibnu Taimiyah di dunia Islam. Salah satu pemikiran

³⁷ Peter Mandaville et al., 'Transnational Islam in South and Southeast Asia', *Director*, no. april (2009): 1-210.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

³⁹ Khaled Hosseini, Ismail Hasani, and Tim Setara Institute, *Radikalisme Agama Di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010).

⁴⁰ Gary Alan Fine and Kent Sandstrom, 'Ideology in Action: A Pragmatic Approach to a Contested Concept', *Sociological Theory* 11, no. 1 (1993): 21, <https://doi.org/10.2307/201978>.

⁴¹ Vahid Hosseinzadeh, 'Salafism and Its Socio-Intellectual Foundations', *Humanities and Social Sciences* 3 (2015): 34-37.

fundamental kelompok salafisme adalah kembali ke Al Qur'an dan Sunnah, serta secara ekstrem dapat dikenali melalui penggunaan frasa-frasa penentangan terhadap hal-hal baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an, Sunnah.

Di Indonesia, gerakan salafi ini dapat dilihat dalam dua aliran, *pertama*, yang berorientasi keagamaan murni yang anti politik (anti hizbiyah). Agendanya, di bidang tauhid mendakwahkan tauhid murni mengikuti *manhaj* (metode) dan amalan tauhid *salaf as-salih* (generasi awal Islam) yang telah didakwahkan oleh Muhammad ibn Abd al Wahhab.⁴² Dalam praktik beragama mereka menyebut dirinya sebagai *ahlu sunnah* sekaligus kelompok anti *bid'ah* (menolak keras terhadap praktik keagamaan yang dinilai tidak mempunyai rujukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul). Mereka juga menolak gerakan dakwah berbasis kelompok organisasi (*dakwah hizbiyah*) karena dianggap 1) tidak sesuai dan menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman (*sabil al-mu'minin*); 2) para pemimpin *dakwah hizbiyah* sangat dekat dengan dosa karena berbuat *bid'ah*; 3) anggota gerakan dakwah hizbiyah meletakkan dasar kesetiannya terhadap pemimpin, bukan loyalitas terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi; dan (4) *dakwah hizbiyah* mengajarkan fanatisme golongan.⁴³ Dalam kasus terbaru di Indonesia, penolakan ini dapat dilihat dari pernyataan penceramah asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Zamzami Nas, Lc MA, sempat viral lantaran menyebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Tarbiyah sesat. Zamzami pun sempat menyebut Ustadz Abdul Somad (UAS) bodoh.⁴⁴

Kedua, yang berorientasi pada politik dan perubahan sosial. Dapat disebut dalam kelompok ini, Laskar Jihad (LJ) dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah (FKAWJ), Laskar Mujahidin Indonesia (LMI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Islamiyah (JI) yang beraliran jihad politik radikal.⁴⁵ Ada juga yang ikut jalur politik resmi, misalnya kelompok yang berakar dari gerakan tarbiyah yang kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera,⁴⁶ dari kelompok fundamentalisme Islam yang berakar dari Masyumi, misalnya menghadirkan Partai Bulan Bintang.⁴⁷ Sementara dari kalangan *civil society*, dapat disebutkan organisasi seperti Persatuan Islam Indonesia (Persis), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan beberapa organisasi sayap yang berafiliasi dengannya. Secara umum, agenda

⁴² Abdurrahman Abu Usamah bin Rawiyah an Nawawi, 'Kedudukan Tauhid Dalam Islam Dan Urgensinya', 2016.

⁴³ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Cornell University Press, Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2006).

⁴⁴ Gatra.com, 'Sebut Muhammadiyah Dan NU Sesat, Penceramah Minta Maaf', Gatra.com, 2021.

⁴⁵ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*.

⁴⁶ Nur Fuad Ai Fatimah, 'Kajian Literatur Tentang Perkembangan Historis Dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah Di Indonesia', *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 349-82.

⁴⁷ Muhammad Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran Dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008).

salafisme yang diusung beberapa kelompok tersebut sangat samar-samar, kecuali pada sebagian tafsir keagamaan yang terkesan tekstual dan eksklusif.

Di luar Salfisme-whabisme gerakan sosial berciri radikal dapat dilihat sebagai kebalikan dan kelompok yang ditolak oleh kelompok salafisme-wahabisme, dan disebut oleh salafisme-wahabisme sebagai *kelompok hizbiyah*, seperti Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan oleh Hasan al-Banna, Hizbut Tahrir (HT) yang dibentuk oleh Taqiyuddin al-Nabhani dan al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden.⁴⁸

Gerakan ITn umumnya memiliki ciri ideologi yang tidak lagi bertumpu pada konsep kenegaraan (*nation-state*), melainkan cenderung fokus pada konsep ideologi untuk kemaslahatan umat yang melampaui batas wilayah negara. Gerakan organisasi ini berorientasi pada agenda penyatuan umat Islam di seluruh dunia, di mana ideologi keislamannya didominasi oleh pemikiran skripturalis, tekstual, normatif, radikal, fundamental. Agenda seperti ini pada umumnya dapat ditemukan pada gerakan bercorak salafisme dan jihadisme.

Gerakan ini merupakan ekspresi politik kebangkitan Islam yang dibarengi dengan tumbuhnya westernisasi. Karena westernisasi merupakan gerakan yang melintas batas negara, maka dengan sendirinya gerakan salafisme adalah bentuk “deteritorialisasi” Islam atau lebih tepatnya gerakan mengembalikan Islam ke dalam sifat dasarnya yang global.⁴⁹

Dalam konteks ideologi, penyebaran gagasan (ideologi) salafisme tidak hanya disebabkan oleh perpindahan (migrasi) para pendukungnya, tetapi menurut Roy, bahwa deteritorialisasi bisa juga dialami oleh Muslim yang tidak melakukan migrasi, tetapi karena mereka dapat mengakses informasi ke sumber ideologi tersebut. Di antara jalur transmisi ide-ide gerakan ini melalui jalur gerakan sosial, pendidikan serta publikasi.⁵⁰

Salafisme dalam konteks ideologi ini dapat dibaca dalam tesis Mohammad Affan.⁵¹ Ideologi Salafi Wahabi secara doktrin dan praktis cenderung mempromosikan sikap eksklusivisme beragama, dan mengambil sikap berbeda (deviant) dari kelompok lainnya. Sementara ideologi politik yang tersambung kepada Ikhwanul Muslimin Hasan Al Banna cenderung menginternasionalisasi kasus-kasus lokal untuk kepentingan politiknya secara global. Terakhir, kelompok Islam politik yang berhaluan revivalisme cenderung berorientasi pada pendirian negara Islam (*Islamic state*).

⁴⁸ Abu Abdillah Luqman Baabduh, ‘Musuh-Musuh Dakwah Tauhid’, 2018.

⁴⁹ Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*.

⁵⁰ Aksa, ‘Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia’.

⁵¹ Abdul-Hamid Affan Mohammad Abdul-Monaem, ‘Competing Models of the Modern Islamic State: Wahhabi vs. Muslim Brotherhood Ideologies’ (American University in Cairo, 2014).

Pemerintah Indonesia menilai ketiga ideologi di atas menjadi sumber hadirnya sikap eksklusivisme yang bermuara pada konflik antar golongan, internasionalisasi kasus-kasus lokal Indonesia akan mengeliminir peran pemerintah Indonesia dalam hubungan internasional dan terakhir, ideologi yang bermuara pada penegakan negara Islam akan menjadi ancaman bagi kesepakatan bernegara dalam bingkai NKRI. Beberapa organisasi atau kelompok gerakan yang disebut ITn di atas hanya beberapa contoh yang mengemuka dan menjadi aktor dalam pasar isu di media Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Tetapi, untuk kepentingan tulisan ini, beberapa poin yang akan diambil dari gerakan ITn tersebut adalah adanya spirit eksklusivisme keagamaan (*religious exclusivism*) yang membawa kepada penolakan bahkan penyerangan terhadap kelompok yang berbeda, eksklusivisme dalam bentuk fanatisme kelompok (*exclusivisme*) dan ekstrimisme yang berujung kekerasan (*violent extrimism*) sebagai kecenderungan bersikap organisasi ITn dalam menjalankan agendanya. Spirit tersebut akan dijadikan sebagai variabel untuk menentukan bentuk dan level tantangannya bagi penguatam moderasi beragama di Indonesia.

ISLAM TRANSNASIONAL VERSUS MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama telah menjadi wacana yang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia kontemporer. Baik dalam konteks perbincangan akademis yang lebih menitik beratkan kepada penggalian konseptual gagasan moderasi beragama, mulai dari makna moderasi, latar belakang, urgensi, hingga kontekstualisasinya dalam mengelola kehidupan beragama tersebut. Di bagian yang lain, terutama di tingkat awam dipahami sebagai serangkaian praktik yang mengungkai pengetahuan tentang cara beragama yang dianggap sudah mapan dan diwarisi secara turun temurun.

Dalam perbincangan itu, terlihat kompleksitas dan tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang heterogen. Ada yang mendukung moderasi sebagai kunci untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan menghindari konflik beragama dalam masyarakat yang begitu beragam. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang merasa konsep moderasi beragama dapat mengaburkan identitas keagamaan mereka, dan bahkan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai keagamaan.

PMB sebagai Kebijakan Publik

Moderasi beragama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah program atau kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga keutuhan masyarakat dari persoalan-persoalan yang berakut dari pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Pemerintah memandang moderasi beragama

sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.⁵² Dalam konteks ini, Moderasi Beragama dapat dipandang sebagai kebijakan publik.

Kebijakan Publik secara luas dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.⁵³ Definisi ini masih terlalu umum. Dalam bentuk yang lebih operasional, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁴ Sebagai keputusan, kebijakan publik ditegaskan dalam bentuk peraturan yang mengikat. Elemen penting dalam kebijakan publik meliputi, a) kebijakan publik dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah, b) kebijakan publik itu tidak hanya sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, c) kebijakan publik dilandasi maksud dan tujuan tertentu, dan d) kebijakan publik itu ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.⁵⁵

PMB dalam konteks kebijakan publik pemerintah merupakan sebuah program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dalam RPJMN itu, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup; 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. PMB yang diprogram pemerintah merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Targetnya adalah membaiknya Indeks Kerukunan Umat Beragama hingga ke angka 75,8 persen.⁵⁶

Program ini sudah memiliki peta jalan (*road map*) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai *leading sector*. Kementerian Agama RI, sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang urusan agama, telah melahirkan rumusan penting apa dan bagaimana moderasi beragama itu dipahami dan diselenggarakan. Terakhir, dengan diterbitkannya *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan*

⁵² Kementerian Agama RI, *Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021).

⁵³ Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership* (Ottawa: Ardent Media, 1871).

⁵⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 14th ed. (Pearson, 2013).

⁵⁵ Muhammad Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

⁵⁶ Republik Indonesia, *Perpres, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (Indonesia, issued 2020).

Moderasi Beragama, kedudukan Penguatan Moderasi Beragama sebagai sebuah kebijakan publik menjadi semakin kokoh.⁵⁷

Dalam buku Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama-- yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum -- berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa."⁵⁸ Definisi ini mengandung makna strategis untuk menempatkan faham keagamaan sebagai daya pengungkit terhadap supremasi martabat kemanusiaan dan kepentingan bersama berdasarkan konstitusi sebagai manifestasi esensi ajaran agama. Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini: (1) berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang berkelindan dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik; (2) berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan; dan (3) berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Oleh sebab itu, konsepsi Moderasi Beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI akan menjadi titik tolak dan perspektif yang operasional untuk merespons dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini.⁵⁹ Dua peristilahan yang termuat dalam tulisan ini, yaitu Moderasi Beragama dan Islam Transnasional dapat dihubungkan sebagai dua konsep dalam relasi yang *opponental*. Moderasi Beragama dapat dibaca sebagai respon pemerintah Indonesia terhadap dinamika gerakan keagamaan transnasional, dan Islam transnasional dapat dibaca sebagai salah satu tantangan dalam program moderasi beragama.

Moderasi Beragama sebagai kebijakan publik berakar dari hipotesis yang berisi situasi kondisi keberagamaan di Indonesia dalam satu dekade terakhir serta prediksi akibat yang dapat diramalkan berdasarkan pendekatan analisis sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, tantangan yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan hipotesis yang berakar dari kondisi sosio-religius bangsa Indonesia. Kondisi tersebut merupakan dasar pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama.

Menangkal Virus REEVE

Secara internal, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam mengelola NKRI.

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penguatan Moderasi Beragama (Indonesia, issued 2023).

⁵⁸ Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Agama, *Peta Jalan (Roadmap) Moderasi Beragama Kementerian Agama RI 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020).

⁵⁹ Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama, 'Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama', Draft IV (Jakarta, 2021).

Di antaranya, keragaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatnya kasus kriminalitas dan narkoba, meningkatnya paham etnosentrisme dan ekstremisme, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap budaya, dan munculnya ideologi-ideologi separatisme.⁶⁰ Di bidang kehidupan beragama, Kementerian Agama RI mencatat, saat ini, setidaknya ada tiga tantangan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu: *Pertama*, menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. *Kedua*, tingginya angka kekerasan bermotif agama. *Ketiga*, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.⁶¹

Tantangan pertama berangkat dari data survey nasional CSIS (2012). Temuannya antara lain, dari 1.200 total responden, ditemukan bahwa 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang berlainan agama; 25% tidak percaya kepada umat agama lain, dan 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya.⁶² Data-data di atas menunjukkan betapa kuatnya sikap keberagaman eksklusif, sebuah sikap keberagaman yang dibangun di atas hilangnya kepercayaan kepada kelompok lain, yang jika dibiarkan akan berujung pada tindakan penyingkiran kepada kelompok lain yang berbeda.

Tantangan kedua, didasarkan pada berbagai konflik sosial keagamaan muncul di berbagai wilayah Indonesia sejak ketahuan Orde Baru. Mulai dari konflik Poso (1998-2001), konflik Ambon (1999-2001), peristiwa bom Bali I (2002), bom J.W. Marriott Jakarta (2003), bom Kedubes Australia di Jakarta (2003), bom Bali II (2005), bom Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta (2009), bom di Jalan Thamrin Jakarta yang dikaitkan dengan jaringan ISIS (2016), penyerangan Markas Polrestabes Surabaya (2018) dan berbagai peristiwa lainnya yang dikaitkan dengan ideologi keagamaan yang tertutup dan praktik kekerasan yang menyertainya.

Kemudian tantangan ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Bentuknya sangat beragam, mulai dari penolakan terhadap Pancasila, menolak kesepakatan bernegara dalam konteks NKRI dan munculnya gerakan mendirikan negara agama.

Pemahaman, sikap, dan cara beragama yang eksklusif, intoleran, berorientasi kekerasan, dan menolak NKRI terus menerus dipasarkan, baik di tengah masyarakat, di lembaga pendidikan, badan usaha milik negara (BUMN) bahkan di kementerian dan lembaga pemerintahan. Dalam konteks program Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, semua tantangan tersebut diformulasikan dalam istilah

⁶⁰ Ahmad Khoiri, *Menakar NKRI Bubar* (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2021).

⁶¹ Beragama, 'Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama'.

⁶² Kompas.com, 'Toleransi Jadi Tantangan', 2012.

REEVE yang merupakan akronim eksklusivisme beragama (*religious exclusivism*), eksklusivisme (*exclusivism*), ekstremisme kekerasan (*violent extremism*). Dalam rumusan yang populer, tantangan itu juga dapat diibaratkan sebagai “Virus REEVE”.

Pemerintah Indonesia memandang, nilai ideologi dan praktik beragama dalam kerangka REEVE ini membahayakan masa depan kehidupan beragama di Indonesia. Sikap eksklusivisme misalnya, merupakan akar pemikiran yang operasional dan terhubung dengan praktik dalam dunia nyata, terutama dalam praktik beragama di ruang publik oleh masyarakat Indonesia yang terkenal religius. Dalam konsep *amplification spiral of why religions and ideologies are particularly susceptible to promoting conflict*, Lynn Davis dan Patrice Brodeur⁶³ menyebutkan bila sikap ini tidak dikelola dengan baik, ia bisa tumbuh menjadi sikap intoleran, diskriminasi, bahkan bisa berujung konflik terbuka yang menghancurkan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga formulasi tantangan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, dapat dipahami bahwa Penguatan Moderasi beragama merupakan respon terhadap cara beragama yang eksklusif, ekstrim dan radikal yang berdampak buruk pada harmonisasi kehidupan sosial masyarakat dan sekaligus membahayakan bagi keutuhan NKRI. Respon ini kemudian dikukuhkan sebagai kebijakan publik.

Di level negara, Penguatan Moderasi Beragama merupakan bentuk respon negara terhadap situasi dan kehidupan beragama di tengah masyarakat. Sementara di level masyarakat, Moderasi Beragama merupakan standar perilaku kolektif masyarakat dalam mengimplementasikan ajaran agama di ruang publik agar tidak berbenturan dengan sesama warga masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ideologi berbangsa dan kesepakatan dalam bernegara.

Oleh sebab itu, gagasan yang dikembangkan dalam Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jika dikaitkan dengan fenomena gerakan ITn, beberapa elemen gerakan, baik karakter, bentuk gerakan serta tujuannya memenuhi sebagai elemen gerakan yang berkategori REEVE tersebut. Terkait tiga tantangan tersebut, kebijakan penguatan Moderasi Beragama diarahkan pada upaya membentuk SDM Indonesia yang berpegang teguh dengan nilai dan esensi ajaran agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan.

⁶³ Beragama, ‘Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama’.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. 'Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar Dan Karakteristik Pemikiran Dan Gerakan Kaum Padri Dalam Perspektif Hubungan Agama Dan Politik Kekuasaan'. Unpublish Paper IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Agama, Kelompok Kerja Penguatan Moderasi. *Peta Jalan (Roadmap) Moderasi Beragama Kementerian Agama RI 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Ai Fatimah, Nur Fuad. 'Kajian Literatur Tentang Perkembangan Historis Dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah Di Indonesia'. *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 349-82.
- Aksa, Aksa. 'Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia'. *Yupa: Historical Studies Journal* 1, no. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.30872/yupa.v1i1.86>.
- Alles, Delphine. *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy Transcending the State*. New York: Routledge, 2016.
- Armstrong, Karen. *Fields of Blood: Religion and the History of Violence*. New York: Knopf, 2004.
- Baabduh, Abu Abdillah Luqman. 'Musuh-Musuh Dakwah Tauhid', 2018.
- Bachtiar, Syamsul Arifin & Hasnan. 'Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam'. *Jurnal Harmoni* 19, no. 3 (2013): 19-36. <https://doi.org/10.24252/vp.v1i1.8099>.
- Beragama, Kelompok Kerja Penguatan Moderasi. 'Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama'. Draft IV. Jakarta, 2021.
- Blanc, Théo, and Olivier Roy. 'SALAFISM: CHALLENGED BY RADICALIZATION?', 2021. <https://doi.org/10.2870/309942>.
- Bruinessen, Martin Van. 'Indonesian Muslims and Their Place in the Larger World of Islam'. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*, no. January 2011 (2012): 117-40. <https://doi.org/10.1355/9789814380416-013>.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 14th ed. Pearson, 2013.
- Eric Tagliacozzo, Shawkat M. Toorawa. *The Hajj: Pilgrimage in Islam*. Edited by Shawkat M. Toorawa Eric Tagliacozzo. *Choice Reviews Online*. Vol. 53. New York: Cambridge University Press, 2016. <https://doi.org/10.5860/choice.197177>.
- Esposito, John L. 'Political Islam and the West'. Washington DC, 2000.
- Esposito, Zafar Ishaq Ansari & John L. *Muslims and the West - Encounter and Dialogue*. Georgetown University, 2001.
- Eyestone, Robert. *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. Ottawa: Ardent Media, 1871.
- Fine, Gary Alan, and Kent Sandstrom. 'Ideology in Action: A Pragmatic Approach to a Contested Concept'. *Sociological Theory* 11, no. 1 (1993): 21. <https://doi.org/10.2307/201978>.
- Formichi, Chiara. 'From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities'. *Al-Jami'ah* 52, no. 1 (2014): 101-26. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.101-126>.
- — —. 'Pan-Islam and Religious Nationalism : The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia'. *Indonesia* 90, no. October (2010): 125-46.
- Gatra.com. 'Sebut Muhammadiyah Dan NU Sesat, Penceramah Minta Maaf'.
-

- Gatra.com, 2021.
- Hilmy, Masdar. 'Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)'. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.
- Hosseini, Khaled, Ismail Hasani, and Tim Setara Institute. *Radikalisme Agama Di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Hosseinzadeh, Vahid. 'Salafism and Its Socio-Intellectual Foundations'. *Humanities and Social Sciences* 3 (2015): 34-37.
- Jusuf Wibisono. *Islam Dan Sosialisme*. Djakarta: Pustaka Islam, n.d.
- Kartosuwirjo. 'Aniajaan Dan Siksaan'. September 1926.
- Khamdan, Muh. 'Penanganan Potensi Radikalisme'. *Journal.Stainkudus.Ac.Id* 10, no. 1 (2016): 207-32.
- Khoiri, Ahmad. *Menakar NKRI Bubar*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2021.
- Khusairi, Abdullah. *Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer: Kontestasi Diskursus Radikalisme Di Media Massa. Dialog*. Vol. 44. Semarang: RaSail Media Group, 2019.
- Kompas.com. 'Toleransi Jadi Tantangan', 2012.
- Mandaville, Peter. *Islam and Politics. Islam and Politics*, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315814773>.
- Mandaville, Peter, Farish A Noor, Alexander Horstmann, Dietrich Reetz, Ali Riaz, Noorhaidi Hasan, Ahmad Fauzi, Abdul Hamid, Rommel C Banlaoi, and Joseph C Liow. 'Transnational Islam in South and Southeast Asia'. *Director*, no. april (2009): 1-210.
- Mohammad Abdul-Monaem, Abdul-Hamid Affan. 'Competing Models of the Modern Islamic State: Wahhabi vs. Muslim Brotherhood Ideologies'. American University in Cairo, 2014.
- Mrahorović, Senad. 'Karen Armstrong, Fields of Blood: Religion and the History of Violence'. *Religions: A Scholarly Journal*, 2016. <https://doi.org/10.5339/rels.2016.peace.21>.
- Mubarak, Muhammad Zaki. *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran Dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Muhammad Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nasir, Muhammad. 'The Historical Background of The Ideology of Terrorism In Indonesia After'. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2016): 46.
- Nawawi, Abdurrahman Abu Usamah bin Rawiyah an. 'Kedudukan Tauhid Dalam Islam Dan Urgensinya', 2016.
- Noorhaidi Hasan. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Cornell University Press, Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2006.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penguatan Moderasi Beragama. Indonesia, issued 2023.
- Rahmat, Muhammad Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ramage, Douglas Edward. 'Ideological Discourse in the Indonesian New Order : State Ideology and the Beliefs of an Elite, 1985-1993'. University of South Carolina,

1993.

- Reid, Anthony. 'Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia'. *The Journal of Asian Studies* 26, no. 2 (1967): 267-83. <https://doi.org/10.2307/2051930>.
- — —. 'Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia'. In *Mengelola Keragaman Di Indonesia: Agama Dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, Dan Bencana Di Indonesia*, edited by Bernard Adeney-Risakotta. Bandung: Mizan, 2015.
- Republik Indonesia. Perpres. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Indonesia, issued 2020.
- RI, Kementerian Agama. *Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Rizaty, Monavia Ayu. 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022', 2022.
- Roy, Olivier. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press, 2004.
- — —. *The Failure of Political Islam*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1994.
- Saefuddin, Lukman Halim. 'Sketsa Kehidupan Beragama Di Indonesia'. Padang: Balai Diklat Keagamaan Padang, 2022.
- Solahudin, Sidney Jones. 'Terrorism in Indonesia: Fading Threat?' *Southeast Asian Affairs*, 2014, 139-147.
- Sucahyo, Nurhadi. 'Ideologi Islam Transnasional Dan Transformasi Ke Konteks Lokal'. voaindonesia.com, 2020.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Edited by Abdurrahman Wahid. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.